

BAB IV

PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan terkait Monitoring Penggunaan Dana APBD Kabupaten Sleman dalam Bidang Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan Tahun Anggaran 2013 yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, peneliti juga akan memberikan saran ataupun masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman. Saran ataupun masukan tersebut tentunya didasari dari temuan fakta dilapangan pada saat penelitian berlangsung, semoga saran yang di berikan oleh peneliti dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerinta Kabupaten Sleman di Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan agar Monitoring anggaran kedepannya menjadi lebih baik.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara Monitoring Dana APBD terhadap Penggunaan Dana APBD di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013, dengan diperoleh nilai t hitung = 3,244 dengan $p = 0,002$, T tabel = 1,675, maka T hitung $>$ T tabel dan $p < 0,05$, artinya tinggi rendahnya Monitoring Dana APBD akan diikuti naik turunnya Penggunaan Dana APBD, semakin tinggi Monitoring Dana APBD,

semakin tinggi pula Penggunaan Dana APBD, dengan demikian juga sebaliknya semakin rendah Monitoring Dana APBD, semakin rendah Penggunaan Dana APBD di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013.

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara Monitoring BPK terhadap Penggunaan Dana APBD di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013, dengan diperoleh nilai t hitung = 3,746 dengan $p = 0,006$, T tabel = 1,812, maka T hitung $>$ T tabel dan $p < 0,05$, artinya tinggi rendahnya Monitoring BPK akan diikuti naik turunnya Penggunaan Dana APBD, semakin tinggi Monitoring BPK, semakin tinggi pula Penggunaan Dana APBD, dengan demikian juga sebaliknya semakin rendah Monitoring BPK, semakin rendah Penggunaan Dana APBD di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui, sumbangan efektif Monitoring Dana APBD dan Monitoring BPK terhadap Penggunaan Dana APBD di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013, dapat dilihat dari R^2 terlihat pada tabel dalam lampiran yaitu 0,180 untuk Monitoring Dana APBD = 18,0% untuk Monitoring Dana APBD dan 0,637 untuk Monitoring BPK = 63,7% untuk Monitoring BPK, Bahwa variabel Monitoring Dana APBD dan Monitoring BPK berhubungan terhadap Penggunaan

Dana APBD di Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2013 sebesar 81,7%. Sedangkan 18,3% yang lainnya dipengaruhi oleh faktor lain tidak termasuk dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan hendaknya merespon kekurangan-kekurangan yang ada dalam rancangan penggunaan dana baik itu dari tenaga kerja, fasilitas, transparansi, program-program kerja dalam memonitoring penggunaan dana APBD bidang Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sehingga anggaran penggunaan dana yang di monitoring tertangani dapat lebih.
2. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan harus lebih mampu kerja sama dengan masyarakat dalam merencanakan program-program yang tersusun sesuai dengan penggunaan dana yang telah dirancang terutama para masyarakat yang berbasic tani, sehingga dalam merancang penggunaan dana dapat di monitoring bersama-sama antara masyarakat dengan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, sehingga monitoring penggunaan dana berjalan dengan baik.

3. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan harus bisa bekerja sama dengan BPK secara baik dalam merancang dan memonitoring penggunaan dana, sehingga dalam memonitoring penggunaan dana menjadi transparansi dan berhubungan baik antara Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan BPK, sehingga menghasilkan monitoring penggunaan dana yang transparansi.
4. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan harus bisa memberikan informasi yang di butuhkan BPK atau masyarakat yang ingin sharing dalam program-program dan penggunaan dana yang transparansi jadi informasi tidak hanya di dapat masyarakat ketika adanya sosialisasi.